

SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
MODERN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, SERTA KEBIJAKAN
INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA DENPASAR**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : I DEWA AGUNG KRISNA PUTRA
NIM : 1815644119**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN,
SOSIALISASI PERPAJAKAN, SERTA KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI KOTA DENPASAR**

I Dewa Agung Krisna Putra

1815644119

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Tingginya jumlah kendaraan di Kota Denpasar tidak diiringi dengan kepatuhan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan data tunggakan dari Kantor Bersama SAMSAT Denpasar tahun 2021 sebesar Rp80.053.277.00 (102.370 unit) dan yang belum teridentifikasi sebesar Rp6.902.197.300 (4756 Unit), hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran dari wajib pajak. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu pemicu menurunnya kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pemerintah mengupayakan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 tahun 2021 serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda. Selain dengan memberikan insentif pemerintah dan petugas pajak bersama-sama senantiasa melakukan pembaruan system serta melakukan sosialisasi kepada wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan mengenai implementasi dari sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan dan insentif pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi Covid-19 di Kota Denpasar. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin dengan tingkat margin of error sebesar 10% sehingga diperoleh jumlah responden sebesar 100 wajib pajak kendaraan bermotor. Pengujian kualitas data dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, asumsi klasik, dan regresi linear berganda dengan SPSS Versi 26.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern dan insentif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan *technology acceptance model* dan teori perilaku terencana, bahwa seseorang akan mempertimbangkan imbas baik atau buruk dari perilakunya. Alasan tersebut memacu wajib pajak untuk tidak melampaui jatuh tempo dan bersedia mengeluarkan uang untuk membayar pajak dibandingkan harus menanggung hal yang lebih merugikan.

Kata Kunci: Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

**THE EFFECT OF IMPLEMENTATION OF MODERN TAX ADMINISTRATION
SYSTEM, TAX SOCIALIZATION, AND MOTOR VEHICLE TAX INCENTIVE
POLICY ON MOTOR VEHICLE TAX COMPLIANCE DURING
THE COVID-19 PANDEMIC IN DENPASAR CITY**

**I Dewa Agung Krisna Putra
1815644119**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The high number of vehicles in Denpasar City is not accompanied by compliance with its tax obligations. Based on arrears data from the Samsat Denpasar Joint Office in 2021, amounting to IDR 80,053,277.00 (102,370 units) and the unidentified amounting to IDR 6,902,197,300 (4756 units), this shows a lack of awareness from taxpayers. The Covid-19 pandemic has become one of the triggers for the decline in the ability of taxpayers to fulfill their obligations. The government seeks to increase taxpayer compliance through Bali Governor Regulation Number 63 of 2021 with Bali Governor Regulation Number 14 of 2022 concerning the Elimination of Administrative Sanctions in the Form of Interest and Fines. In addition to providing incentives for the government and tax officers together to always update the system and socialize to taxpayers.

This study aims to determine the partial and simultaneous influence of the implementation of the modern tax administration system, tax socialization and motor vehicle tax incentives on motor vehicle taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic in Denpasar City. The determination of the number of samples using the slovin formula with a margin of 10% error rate, so that the number of respondents was obtained by 100 motor vehicle taxpayers. Data quality testing is carried out through validity tests and reliability tests, while the data analysis techniques used are descriptive statistics, classical assumptions, and multiple linear regression with SPSS Version 26.

The results of the study concluded that the modern system of administration and tax incentives has a positive and significant influence on the compliance of motor vehicle taxpayers. Concurrently, tax socialization has a negative and insignificant influence on the compliance of motor vehicle taxpayers. This is in line with the technology acceptance model and planned behavior theory, that a person will consider the good or bad impact of his behavior. This reasoning spurs taxpayers not to exceed maturity and to be willing to spend money to pay taxes instead of having to endure more detrimental things.

Keywords: modern system of administration, tax socialization, and tax incentives, compliance of motor vehicle taxpayers

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
MODERN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, SERTA KEBIJAKAN
INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA DENPASAR**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : I DEWA AGUNG KRISNA PUTRA
NIM : 1815644119**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : I Dewa Agung Krisna Putra
NIM : 1815644119
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan, serta Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Denpasar
Pembimbing : I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom.
Drs. I Made Wijana, MSc., St.
Tanggal Uji : 11 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 15 Agustus 2022



I Dewa Agung Krisna Putra

SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
MODERN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, SERTA KEBIJAKAN
INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA DENPASAR**


DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : I DEWA AGUNG KRISNA PUTRA
NIM : 1815644119**

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


I Nyoman Abdi, SE., M.eCom
NIP. 196512211990031003


Drs. I Made Wijana, MSc., ST.
NIP. 196406241990031002


**JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS PNB
DENPASAR**
I Made Sudana, SE., M.Si.
NIP. 196112281990031001

SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
MODERN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, SERTA KEBIJAKAN
INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA DENPASAR**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA:



I Nvoman Abdi, SE., M.eCom
NIP. 196512211990031003

ANGGOTA:



2. **I Gusti Ayu Astri Pramitari, SE., M.Ak**
NIP. 198903082015042005



3. **Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum**
NIP. 196303201990112001

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmat-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan, serta Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Denpasar”** mampu diselesaikan tepat pada waktunya. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali.

Saya menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan serta bimbingan berbagai pihak. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Politeknik Negeri Bali serta telah bersedia menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dalam menyusun skripsi ini.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi dengan baik.
3. Bapak Cening Ardina, S.E., M.Agb., selaku Ketua Program Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali, yang selalu

memberi arahan terkait proses penyusunan skripsi serta semangat untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu.

4. Bapak Drs. I Made Wijana, M.Sc., St., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak motivasi serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu seluruh Staf dan Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan dukungan yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
6. Orang tua dan keluarga tercinta serta orang-orang terkasih, yang selalu memberi motivasi, materi, dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi menyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Badung, Juli 2022

Penulis.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Abstrak	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori.....	13
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	22
C. Kerangka Berpikir dan Konseptual.....	25
D. Hipotesis Penelitian/ Pertanyaan Penelitian Kuantitatif.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	34
D. Variabel Penelitian dan Definisi.....	35
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	38
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	46
B. Hasil Uji Hipotesis.....	61

C. Pembahasan.....	66
D. Keterbatasan Penelitian.....	73
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Simpulan	74
B. Implikasi.....	75
C. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor yang telah membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar Tahun 2019-2021 (dalam unit).....	4
Tabel 1.2 Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Denda di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar Tahun 2019-2021	4
Tabel 3.1 Skala Likert.....	39
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	50
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas.....	52
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas.....	53
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas- Kolmogorov-Smirnov	54
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	57
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	59
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	60
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	62
Tabel 4.9 Hasil Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji t)	63
Tabel 4.10 Hasil Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji F).....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	27
Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian.....	31
Gambar 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Gambar 4.2 Responden Berdasarkan Usia.....	48
Gambar 4.3 Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	48
Gambar 4.4 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	49
Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas Berdasarkan Probability Plot	55
Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas Berdasarkan Grafik Histogram	56
Gambar 4.7 Uji Heteroskedastisitas – Grafik Scatter Plot.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat permohonan izin mencari data kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	85
Lampiran 2: Surat persetujuan izin mencari data kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	86
Lampiran 3: Data Jumlah Kendaraan, Penerimaan PKB, Denda, dan Tunggakan Pada Kantor Bersama Samsat Denpasar Tahun 2019-2021	87
Lampiran 4: Hasil uji validitas	88
Lampiran 5: Hasil uji reliabilitas	92
Lampiran 6: Kuesioner Penelitian	93
Lampiran 7: Data Tabulasi Hasil Kuesioner	102
Lampiran 8: Hasil uji Asumsi Klasik	106
Lampiran 9: Hasil Uji Hipotesis	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Unsur krusial yang dapat mempengaruhi pendapatan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu pajak. Sebagai instrumen fiskal, pajak mempunyai peranan dalam membangun negara serta memajukan pemerintahan. Pajak dapat pula dipergunakan sebagai upaya dalam memulihkan pertumbuhan ekonomi (Nurisdianto, 2019). Klasifikasi pajak terdiri dari pajak pusat serta pajak daerah. Pajak yang digunakan sebagai pembiayaan negara dan disetorkan kepada pemerintah pusat dinamakan pajak pusat. Pajak yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan daerah dan disetorkan kepada pemerintah daerah disebut pajak daerah. Upaya pemerintah selalu dikerahkan untuk terus memberi peningkatan pada pendapatan negara yakni melalui pajak daerah. Penerimaan dari pajak daerah dapat diketahui dari pendapatan yang asalnya dari potensi suatu daerah yang bersangkutan yang disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah yang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Pandemi COVID-19 yang telah melanda di Indonesia sejak tahun 2020 khususnya pada Provinsi Bali, masyarakat mengalami penurunan daya beli yang mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat untuk membayar

pajak (Yuniati & Amini, 2020). Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Bali berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali (BAPENDA) secara bertahap mulai merencanakan berbagai inovasi, dengan harapan kondisi ekonomi kembali pulih dan roda perekonomian masyarakat kembali seperti semula sehingga mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara teratur. Pemerintah Provinsi Bali berupaya dalam menghadapi kondisi pandemi dengan cara meningkatkan pendapatan pajak daerah (Pajak Provinsi) lewat pemungutan pajak yang dilaksanakan dengan efektif-efisien. Salah satu pajak daerah yang berkontribusi cukup besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Tanan, 2021).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yakni kontribusi wajib yang dibayar oleh individu maupun badan atas sebuah kepemilikan serta kewenangan atas kendaraan bermotor (Pratiwi & Irawan, 2019). Instansi yang menangani urusan dalam pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor ialah Badan Pendapatan Daerah lewat Unit Pelayanan Teknis dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dengan bekerja sama dengan pihak terkait seperti Kepolisian RI dan PT Jasa Raharja. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sudah lama diberlakukan, dan dari waktu ke waktu pertumbuhan jumlah kendaraan menunjukkan perkembangan cukup signifikan setiap tahunnya (Rizal & Hidayah, 2019). Pengoptimalan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor perlu dilakukan dengan membuat berbagai kebijakan strategis,

seperti berusaha meningkatkan taraf kepatuhan para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017).

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya dipengaruhi oleh beragamnya inovasi dari jenis kendaraan itu sehingga menarik daya minat masyarakat, hal tersebut juga akibat kebutuhan akan transportasi itu sangatlah penting digunakan untuk kehidupan sehari-hari baik untuk kegiatan operasional maupun non operasional. Hal itu ditunjukkan Kota Denpasar sebagai kota dengan jumlah kendaraan bermotor tertinggi pertama di Provinsi Bali, pada tahun 2021 yaitu sebanyak 1.470.570 juta unit diikuti Kabupaten Badung 934.120 unit, dan Kabupaten Gianyar 477.431 unit dengan total keseluruhan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Bali sebanyak 4.510.791 juta unit (BPS, 2021). Tingginya jumlah kendaraan di Kota Denpasar tidak diiringi dengan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya, yang dalam kasus ini yakni pajak kendaraan bermotor. Berikut merupakan data perkembangan jumlah kendaraan bermotor terdaftar yang sudah melaksanakan kewajiban perpajakan dari tahun 2019 - 2021 di Kota Denpasar:

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor yang telah membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar Tahun 2019-2021 (dalam unit)

Jenis Kendaraan	Tahun		
	2019	2020	2021
Sedan	10.324	8.496	7.628
Jeep	17.403	15.751	14.988
Minibus	126.606	114.847	111.964
Microbus	1.899	1.312	1.283
Bus	581	447	431
Pick Up	23.071	20.499	19.073
Light Truck	6.200	5.772	5.498
Truck	2.116	1.832	1.782
Sepeda Motor	608.186	527.091	476.476
Total	796.386	696.047	639.123

Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Denpasar, Tahun 2022

Informasi pada Tabel 1.1 mengindikasikan jumlah kendaraan yang sudah menjalankan kewajibannya mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2021. Hal tersebut akibat dampak pandemi yang dirasakan oleh wajib pajak yang mengakibatkan masih belum patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Dari penurunan yang terjadi tentu akan memengaruhi pendapatan, tunggakan dan denda. Terlihat pada Tabel 1.2:

Tabel 1.2
Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Denda di Kantor
Bersama SAMSAT Denpasar Tahun 2019-2021

Tahun	Pendapatan	Denda
2019	589.047.145.464	20.398.731.175
2020	530.027.287.150	9.251.076.662
2021	534.572.088.500	13.535.029.800

Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Denpasar, Tahun 2022

Tabel 1.2 mengindikasikan jumlah pendapatan mengalami perubahan secara fluktuatif setiap tahunnya, terdapat peningkatan dari tahun 2020 sampai 2021 akibat banyaknya relaksasi pajak yang telah diberikan oleh pemerintah daerah, namun masih belum dapat dikatakan maksimal. Terbukti dari denda yang dihasilkan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 cukup besar dan mengalami perubahan yang fluktuatif juga. Selain itu dapat dilihat pada jumlah tunggakan pada tahun 2021 didapatkan data dari Kantor Bersama SAMSAT Denpasar terhitung sebesar Rp 80.053.277.00 (102.370 unit) dan yang belum teridentifikasi sebesar Rp 6.902.197.300 (4756 Unit), hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran dari wajib pajak meskipun telah diadakannya sanksi berupa denda oleh pihak fiskus.

Berkurangnya penerimaan pajak daerah dalam hal ini Pajak Kendaraan Bermotor di masa pandemi COVID-19 juga terjadi akibat berkurangnya kemampuan wajib pajak untuk membayarkan pajak tiap tahun. Banyaknya wajib pajak yang dengan alasan tidak memiliki cukup uang akibat menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan faktor penyebab wajib pajak menunggak dalam membayarkan pajaknya (Sari et al., 2021). Adanya

himbauan pemerintah untuk menerapkan WFH (*work from home*) untuk mengurangi aktivitas yang melibatkan tatap muka salah satunya pembatasan layanan publik pada kantor bersama samsat juga akan menghambat penerimaan pajak termasuk pajak kendaraan bermotor (Tanan dan Doko 2021). Pemerintah daerah serta instansi yang berwenang harus mengambil tindakan segera serta upaya luar biasa demi menyelamatkan stabilitas ekonomi serta tatanan moneter nasional.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan para wajib Pajak Kendaraan Bermotor di kala pandemi COVID-19, pemerintah terus melakukan pembaharuan terhadap sistem administrasi perpajakan di era teknologi. Sistem administrasi perpajakan modern diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui inovasi yang ditujukan langsung kepada wajib pajak untuk memperbaiki proses pembayaran pajak yang lebih baik, yang dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai antara lain seperti: E-Samsat, SIGNAL (samsat digital nasional), Samsat VAST, Qris, Samsat *Corner*, Samsat Keliling, Samsat *Drive Thru*, Samsat *Door to Door*, serta peningkatan sistem samsat lainnya menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi serta harapan rakyat. Pembaharuan tatanan administrasi pajak yang lama mempunyai tujuan memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat daerah setempat demi kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, sehingga aktivitas pembayaran tersebut semakin sederhana dan cepat, yang akhir-akhir ini tampak lambat, masih menggunakan teknik tradisional, serta antrean panjang yang dirasa sangat melelahkan bagi wajib pajak (Pratiwi &

Irawan, 2019). Zuhdi et al., (2019) memandang, implementasi sistem administrasi modern adalah model implementasi yang akuntabel serta transparan yang memberdayakan teknologi informasi sehingga tercipta penerimaan pajak yang efektif-efisien. Hal ini selaras dengan penelitian (Virgiawati et al., 2019) yang menyebutkan, modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh positif pada kepatuhan para wajib pajak kendaraan bermotor.

Ketidakhahaman wajib pajak terkait fungsi melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor amat berimbas pada pendapatan pajak negara. Pentingnya mengoptimalkan sosialisasi perpajakan di masa pandemi yang dilaksanakan pihak fiskus kepada wajib pajak, agar wajib pajak mengetahui dampak dari program yang ada, proses, serta tahapan melakukan pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, hal tersebut tentu akan menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah yang masih terdengar cukup awam bagi wajib pajak, membuat pihak Samsat Denpasar harus segera mengoptimalkan informasi terkait pembaharuan prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Melalui sosialisasi atau penyuluhan seperti menggunakan media cetak (baliho), media visual (*website* serta berbagai laman media sosial), maupun sosialisasi secara langsung yang telah dijalankan, namun hasil dari sosialisasi tersebut dirasa belum maksimal akibat masih kurangnya peran fiskus untuk memastikan penyampaian materi yang telah diberikan terserap

dengan baik oleh wajib pajak. Penyuluhan perpajakan dapat diarahkan pada 3 sasaran utama, yaitu pembayar pajak terdaftar, baru terdaftar, dan calon pembayar pajak (Subroto, 2020). (Ardiyanti & Supadmi, 2020) memaparkan, makin baik pelaksanaan sosialisasi perpajakan, maka kepatuhan pun akan meningkat. Penelitian tersebut didukung oleh (Widiastini & Supadmi, 2020) yang memaparkan, Sosialisasi Perpajakan mempunyai pengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pemerintah Provinsi Bali memberi relaksasi pajak berupa insentif pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 tahun 2021 serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 tahun 2022 perihal Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor. Kebijakan tersebut memberikan pembebasan bunga dan denda kepada wajib pajak yang akan melaksanakan pembayaran pajak PKB serta BBNKB II, mulai tanggal 4 April hingga 31 Agustus 2022. Kebijakan insentif tersebut kembali dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang sebelumnya diberlakukan dari tanggal 21 April 2020 hingga 18 Desember 2020 dan kembali dilaksanakan mulai tanggal 8 Juni 2021 hingga 17 Desember 2021, Hal tersebut didasarkan dengan adanya dampak pandemi yang mengkhawatirkan terhadap berbagai bidang, baik swasta maupun pemerintah khususnya pada penerimaan pajak daerah . Situasi tersebut mengharuskan pemerintah Provinsi Bali membuat langkah-langkah strategis dalam rangka memberi dorongan fiskal guna meringankan beban rakyat yang merasakan dampak pandemi khususnya untuk membayar kewajiban

perpajakan yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini memperoleh dukungan dari penelitian (Sartika et al., 2021) yang menyatakan, insentif pajak kendaraan bermotor selama pandemi COVID-19 tahun 2020 mempunyai pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Melalui adanya sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan, serta kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor diharapkan dapat memberi peningkatan kepatuhan wajib pajak ketika melaksanakan kewajiban yang juga akan meningkatkan pendapatan pajak daerah serta dapat meringankan beban wajib pajak terutama pada masa pandemi COVID-19.

B. Rumusan masalah

Atas dasar latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi COVID-19 di Kota Denpasar?
2. Apakah penerapan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi COVID-19 di Kota Denpasar?
3. Apakah kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi COVID-19 di Kota Denpasar?

4. Apakah Penerapan sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan insentif pajak kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi COVID-19 di Kota Denpasar?

C. Batasan Masalah

Batasan permasalahan pada penelitian ini yakni wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di kota Denpasar. Peneliti memilih wajib pajak kendaraan bermotor sebagai objek penelitian karena dianggap sebagai salah satu dampak ketidakstabilan perekonomian daerah akibat pandemi. Turunnya tingkat pendapatan masyarakat dan kemampuan akan membayar pajak, membuat mereka tidak rela secara cuma-cuma mengeluarkan beban yang dianggap tidak memberikan timbal balik secara langsung. Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 tahun 2021 serta Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor, dalam penelitian ini berfokus pada penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tidak meneliti pada bagian pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian ini yakni:

1. Guna mengetahui pengaruh dari sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi COVID-19 di Kota Denpasar.

2. Guna mengetahui pengaruh dari sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi COVID-19 di Kota Denpasar.
3. Guna mengetahui pengaruh insentif pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi COVID-19 di Kota Denpasar.
4. Guna mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan, dan insentif pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara simultan pada masa pandemi COVID-19 di Kota Denpasar.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini mampu memberi pengetahuan mengenai sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan, serta insentif pajak kendaraan bermotor sebagai fondasi dasar peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun penelitian ini juga mampu menambah wawasan mahasiswa serta wujud pengaplikasian teori yang diperoleh selama mengikuti pembelajaran pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali dengan implementasi yang ada di kehidupan nyata.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini mampu menjadi tolak ukur sejauh mana mahasiswa dapat menerapkan teori yang didapatkannya semasa duduk dibangku perkuliahan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sumbangan referensi kepustakaan atas penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini mampu memberi tambahan pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan landasan sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan, serta insentif pajak kendaraan bermotor di masa pandemi COVID-19. Adapun Wajib Pajak Kendaraan Bermotor mampu memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan pemerintah. Dengan memahami hal tersebut wajib Pajak Kendaraan Bermotor sadar akan pentingnya peran dan kontribusi hasil penerimaan pajak sehingga berupaya untuk meningkatkan rasa patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

4. Bagi Kantor Samsat Denpasar

Penelitian ini mampu memberi kontribusi pemikiran kepada pihak terkait, juga bahan evaluasi untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih baik setiap tahunnya, sehingga wajib pajak bisa meningkatkan kepatuhan membayar pajaknya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Simpulan yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yaitu:

1. Variabel sistem administrasi perpajakan modern mengindikasikan nilai signifikan $< 0,05$ yakni $0,000$. Hal tersebut bermakna penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka, kian meningkatnya pemahaman dan penggunaan pembaharuan layanan Samsat secara terus – menerus dapat meningkatkan keinginan wajib pajak terkait pembayaran pajaknya. Hasil ini didukung oleh teori *Technology Acceptance Model* dengan faktor *perceived usefulness* akan sangat memberi kemudahan wajib pajak terkait pembayaran pajak kendaraan bermotornya dan dapat mengefisiensikan waktu dalam menunaikan pembayaran pajak.
2. Variabel sosialisasi perpajakan mengindikasikan nilai signifikannya $> 0,05$ yakni $0,928$. Hal tersebut bermakna implementasi sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya semakin tinggi sosialisasi perpajakan yang diadakan tidak mampu meningkatkan minat wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu. Sosialisasi yang dilakukan oleh kantor Samsat Denpasar sudah cukup baik, namun masih

adanya responden yang merasa tidak paham tentang informasi yang disampaikan terutama sosialisasi tidak langsung melalui media digital.

3. Variabel insentif pajak kendaraan bermotor mengindikasikan nilai signifikannya $< 0,05$ yakni 0,000. Hal tersebut bermakna penerapan insentif pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya kebijakan yang diberikan pemerintah terkait bebas BBNKB II dan pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat memberikan peningkatan pada kepatuhan wajib pajak ketika membayar pajak kendaraan bermotor karena kebijakan tersebut memberi keringanan beban wajib pajak dengan cara meniadakan beban denda atas pembayaran yang terlambat.
4. Variabel sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan dan insentif pajak kendaraan bermotor secara simultan atau secara serentak berpengaruh pada Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor. Berdasarkan nilai koefisien determinasi, ketiga faktor tersebut mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 71,8%.

B. Implikasi

Penelitian ini dilakukan akibat dari adanya fenomena yang terjadi. Fenomena berujung pada dampak atau implikasi bagi pembaca. Penelitian ini mengharapkan implikasi positif bagi beberapa pihak diantaranya:

1. Mahasiswa

Kontribusi yang diberikan oleh mahasiswa berperan sebagai generasi yang memberikan perubahan. Salah satunya dengan mampu menghasilkan

penelitian yang bermanfaat. Implikasi dari penelitian, mahasiswa mendapat tambahan wawasan serta pengetahuan yang bermanfaat sebagai bahan untuk dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Otoritas Pajak

Sebagai pemegang peran penting, otoritas pajak memiliki kewenangan berkaitan dengan perpajakan. Penelitian ini semata ditujukan untuk kepentingan otoritas pajak dalam mengetahui kondisi di lapangan. Penelitian ini dapat menjadi sumber mengenai penilaian dan perkembangan kepatuhan Wajib pajak. Implikasinya yaitu otoritas pajak dapat mengetahui hasil dari penerapan sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan serta insentif pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan Wajib pajak kendaraan bermotor.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam memperbaiki faktor yang diteliti, yaitu

1. Bagi wajib pajak kendaraan bermotor

Adanya pengaruh positif dan signifikan antara pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern serta pemberian insentif pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak, wajib pajak kendaraan bermotor sebaiknya menumbuhkan rasa kesadaran akan hak dan kewajiban perpajakannya. Penerapan sistem administrasi perpajakan yang kini dimudahkan dengan sistem yang moderen, komputerisasi, serta adanya bantuan dari Kantor Samsat Denpasar sebaiknya dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak dalam

berkontribusi secara aktif dalam mendukung program pemerintah. Kurangnya pengaruh dari sosialisasi yang telah dijalankan oleh otoritas pajak, penyaluran materi sosialisasi masih melalui bantuan aparat desa sehingga informasi yang diberikan belum sepenuhnya terjamin tersampaikan secara langsung kepada wajib pajak. diharapkan berperan aktif dalam memberikan masukan berupa kritik maupun saran agar sosialisasi yang diberikan tersampaikan dengan baik.

2. Bagi Kantor Samsat Denpasar

Dalam rangka meningkatkan kembali kepatuhan wajib pajak, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan bantuan Kantor Samsat Denpasar dapat mengefektifkan program sosialisasi mengenai pembaharuan prosedur perpajakan, manfaat serta berbagai kebijakan tentang insentif pajak kendaraan bermotor. Kantor Samsat Denpasar yang menjadi perpanjangan tangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali juga dapat membuat inovasi agar dapat memotivasi wajib pajak. Inovasi tersebut dapat berupa program turun langsung menangani wajib pajak yang masih memiliki kendala dengan memberikan pengarahan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kendala ini bisa berupa kesulitan dalam menggunakan sistem administrasi perpajakan modern maupun memanfaatkan insentif pajak kendaraan bermotor yang masih kurang.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji kembali sesuai dengan beberapa keterbatasan dalam proses penelitian ini. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memperluas ruang lingkup maupun menambah variabel lainnya yang diprediksi dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, lokasi penelitian juga dapat dilakukan di Kantor Samsat yang berbeda atau mencakup seluruh Kantor Samsat yang ada di bawah naungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Memperbanyak responden juga dapat dilakukan dalam melakukan penelitian selanjutnya agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif.

Perluasan ruang lingkup dapat dilakukan menggunakan metode penelitian yang berbeda seperti melakukan wawancara kepada wajib pajak untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, sedangkan penambahan variabel yang berbeda yang sekiranya dapat digunakan seperti kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Kualitas pelayanan dapat digunakan dalam mengimbangi variabel sistem administrasi perpajakan modern dan variabel sosialisasi perpajakan agar dapat mengetahui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, sanksi pajak dapat digunakan dalam mengimbangi variabel insentif pajak kendaraan bermotor agar wajib pajak kendaraan bermotor lebih tertarik untuk memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah di masa

pandemi COVID-19 dengan adanya hukuman yang mengintai apabila tidak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan prosedur yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwanda, A. M. D. (2020). Penerapan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Aprilianti, A. A. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK, DAN SISTEM E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTORDI MASA PANDEMI COVID-19. *Assets : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(1).
- Ardiyanti, I. (2019). Pengaruh Kelelahan Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Turnover Intention. *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen*, 3(1). <https://doi.org/10.33603/jibm.v3i1.2190>
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8). <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p02>
- Arifah, Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Ekonomi – Akuntansi 2017*.
- Astana, I. W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Januari*, 181.
- Barus, S. A. H. (2016). Faculty of Economics Universitas Riau ., *Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, 3(1), 295–309.
- Darmawan, D. (2019). Inovasi Sektor Publik Dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Kota Makassar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- Debiyanti, N. A. (2021). *PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN MODERN BERBASIS E-SAMSAT, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT GOWA [UNIVERSITAS HASANUDDIN.]*. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/11533>

- Fauzah, I. (2020). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Berbasis Esamsat Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kantor Samsat Pemalang). In *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 53(9).
- Ghozali, I. & L. H. (2015). Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 3.0. In *Universitas Diponegoro. Semarang*.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 3.0. In *Universitas Diponegoro. Semarang*.
- Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah, M. (2018). Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajip Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *InFestasi*, 13(2). <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i2.3514>
- Nurisdianto, W. E. (2019). *Betapa Krusialnya Pajak Dalam Portal Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*.
- Pratiwi, I., & Irawan, A. (2019). PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Cimareme). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1).
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2). <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.78>
- Rismayanti, N. W. I. (2021). Pengaruh Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermototr. *HITA Akuntansi Dan Keuangan, Universitas Hindu Indonesia*, 234–251.
- Rizal, Y., & Hidayah, M. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1). <https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.464>
- Rosita Dewi, I. G. A. M., & Laksmi P, K. W. (2019). EFEKTIVITAS E-SAMSAT, PAJAK PROGRESIF DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1). <https://doi.org/10.38043/jiab.v4i1.2151>
- Sari, A. P., Nafisah, D., Susanti, F., Setianingsih, H. E., & Hayati, N. M. (2021).

- Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah Solo Raya. *Academica Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(1).
- Sartika, E. D., Afifah, N., & Sari, S. N. (2021). PENGARUH INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SELAMA PANDEMI COVID 19 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SULAWESI SELATAN. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2). <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i2.4144>
- Sitohang, A., & Sinabutar, R. (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak Di Tengah Wabah Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13.
- Subroto, G. (2020). *Pajak & Pendanaan Peradaban Indonesia*.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Susanti, N. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi. Yogyakarta: Akuntansi, FEB UII Yogyakarta*, 5(3).
- Syanti, D., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2).
- Tanan, C. I. K. A. D. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Masa Covid-19 di Kota Jayapura. *Journals of Economics Development Issues*, 4(1).
- Virgiawati, P. A., Samin, & Kirana, D. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan). *Jurnal MONEX*, 8(2).
- Viva, A. A., Kowel, L. A. A., & Kalangi, S. J. (2019). Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan the Effect of Taxpayer Knowledge , Taxpayer Awareness and Modernization of Tax Administration System To Taxpayer Compliance of Motor Vehicles in. *Tangkuman 4251 Jurnal EMBA*, 7(3).
- Wardani, D. K., & Rumiyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Widiastini, N. P. A., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7). <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p03>

- Wijayanti, L. P. C., & Sukartha, I. M. (2018). Pengaruh Tarif Progresif , Kualitas Pelayanan , Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(3), 2011–2040.
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1).
- Wondal, M., Lambey, L., & Wangkar, A. (2018). IMPLIKASI PENERAPAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2017 TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT MANADO. *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI*, 14(1). <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20895.2018>
- Yuniati, M., & Amini, R. (2020). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Daya Beli Masyarakat Ntb. *Jurnal Penelitian Manajemen*, 2(2).
- Zuhdi, Muhammad Imam Suryadi, D., & Yuniati. (2019). Pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kpp pratama bandung x. . . *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*.